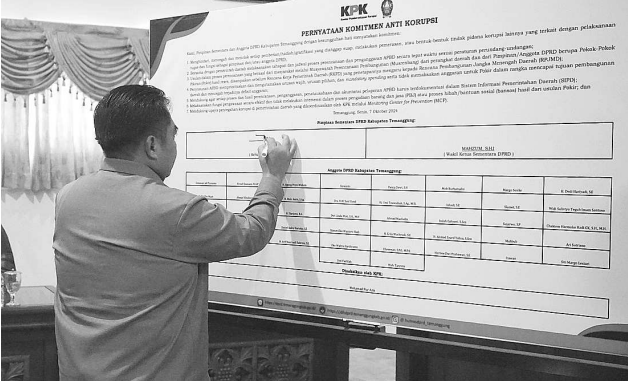


ANTI KORUPSI DI TEMANGGUNG
DPRD Dukung Pemberantasan



KR-Zaini Arrosyid

Penandatanganan komitmen antikorupsi anggota DPRD Temanggung.

TEMANGGUNG (KR) - DPRD Kabupaten Temanggung menyatakan komitmen mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Sementara DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto mengatakan DPRD punya tiga fungsi utama, yakni pembentukan perda, pengawasan dan anggaran. "Tiga fungsi ini juga untuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi," jelasnya, Jumat (11/10).

Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen antikorupsi secara bersama-sama, disaksikan seluruh tamu undangan. Yunianto mengapresiasi kehadiran tim KPK ke lembaga legislatif dalam sosialisasi dan supervisi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Temanggung. Khusus di DPRD adalah peran seluruh anggota DPRD. Sosialisasi diikuti 45 anggota DPRD Temanggung serta staf sekretariat di lingkungan DPRD setempat.

Ketua Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK Muhammad Nur Aziz menekankan pentingnya peran anggota DPRD dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. Dia mengingatkan anggota DPRD agar tidak menyalahgunakan wewenang. DPRD bekerja melalui pokok pikiran dan bukan pelaksana proyek. "Pokok pikiran sebagai masukan dan pengawasan sedangkan pelaksanaan proyek adalah kewenangan eksekutif," tandasnya. **(Osy)-d**

Kemala Bhayangkari Launching
Program Anak Gemar Menabung



KR-Karyono

Pembagian buku rekening dan kartu Siswa pada launching program Anak Gemar menabung.

SEMARANG (KR) - Yayasan Kemala Bhayangkari Jateng melaunching anak gemar menabung. Tujuannya mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menabung dan menghargai uang. Hal itu diungkapkan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Diana Ribut Hari Wibowo pada launching program anak gemar menabung di Queen City Mall Kota Semarang.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu event dalam Bhayangkari Preneur Expo 2024, 10-11 Oktober 2024. Pada acara itu juga dibagikan buku rekening dan kartu Siswa dari TK sampai SMP.

Menurut Diana, menabung merupakan investasi yang paling sederhana, oleh sebab itu ada baiknya kebiasaan menabung diperkenalkan kepada anak sejak dini sebagai awal pembelajaran mereka tentang berinvestasi. "Program anak gemar menabung kali ini atas kerja sama dari Yayasan Kemala Bhayangkari Jateng bersama Polda Jateng dan BRI," jelasnya.

Ia berharap melalui kegiatan ini dapat melatih anak untuk bersabar, menaruh diri dan disiplin serta dapat memenuhi keinginannya tanpa tergantung dari orangtua sekaligus dapat menghindarkan anak dari sifat boros dan konsumtif.

Kabidhumas Polda Jateng Kombespol Artanto menyatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-72 tahun 2024. "Kebiasaan menabung mampu melatih kita untuk disiplin dalam mengatur keuangan karena saat memulai untuk menabung pasti ada uang jajan yang harus disisihkan," ujar Kombespol Artanto.

Kabid Humas Polda Jateng menambahkan, Bhayangkari memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mendukung keberhasilan tugas Polri. Peranan Bhayangkari selaku para istri pendamping anggota Polri juga berperan besar dalam mendukung keberhasilan tugas Polri. "Banyak program dan capaian prestasi yang ditorehkan Bhayangkari dalam mendukung tugas Polri," tandasnya. **(Cry)-d**

DI KABUPATEN SUKOHARJO
KPU Buka Layanan Pindah Pemilih

SUKOHARJO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo membuka posko layanan pindah memilih tempat pemungutan suara (TPS) pada pelaksanaan Pilkada 2024. Posko dibuka mulai 27 Oktober hingga 19 November 2024. Layanan diberikan untuk mengakomodasi pemilih yang akan pindah TPS pada pemungutan suara 27 November 2024 mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo, Sabtu (12/10) mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sukoharjo, Senin (7/10). Dalam rapat koordinasi tersebut, KPU menekankan kepada jajaran PPK untuk segera dapat membuka posko layanan DPTb di setiap kantor sekretariat PPK dan kantor sekretariat PPS. "Dengan dibukanya Posko Layanan Pindah Memilih atau help desk di setiap kantor Sekretariat PPK dan PPS, diharapkan mampu melayani masyarakat yang karena keadaan tertentu pada waktu pemungutan suara nanti tidak bisa melakukan coblosan di tempat asal," jelas Syakbani. **(Mam)-d**

BERSAMA 6 DAERAH LAIN DI JATENG

Kota Magelang Terima Penghargaan BPJS

MAGELANG (KR) - BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Magelang atas implementasi terhadap program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pekerja rentan tahun 2024. Kota Magelang mendapat apresiasi atas Inovasi Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui Mekanisme Anggaran Pemerintah Daerah TA 2024 sebanyak 2.044 Tenaga Kerja Informal.

Piagam penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno dan diterima Pjs Walikota Magelang Ahmad Aziz di sela-sela kegiatan Diseminasi dan Asistensi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ekosistem Desa di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Artora Magelang, Kamis (10/10) lalu.

Pjs Walikota Magelang Ahmad Aziz menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi agar pekerja Kota Magelang di sektor informal terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Disebutkan pekerja rentan di Kota Magelang yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 90 persen atau se-

banyak 2.046 orang dari target 2.300 orang.

"Mereka bukan penerima upah itu seperti anggota linmas, buruh serabutan, guru ngaji, juru parkir, pekerja disabilitas, pekerja sosial, pemulung, pemulasaran jenazah, petani, petugas sampah RT-RW, satpam kompleks, sopir angkot, becak, ojek, UMKM dan sebagainya," ungkap Ahmad Aziz.

Menurutnya, pekerja rentan memang perlu edukasi, sosialisasi. Faktanya, ada beberapa warga yang tidak mau masuk BPJS Ketenagakerjaan karena berpersepsi kalau masuk BPJS nanti ban-sosnya hilang. "Padahal tidak seperti itu," tandas Aziz.

Aziz yang juga Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, mengatakan Pemerintah Kota Magelang berkomitmen dan



KR-Thoha

Pj Walikota Magelang saat menerima penghargaan yang diserahkan Sekda Provinsi Jateng.

berupaya agar coverage BPJS Ketenagakerjaan 100 persen atau 12 bulan pada tahun 2025. "Tahun 2024 tercover enam bulan, dari Juli sampai dengan Desember 2024. Sedangkan tahun 2025 tercover 12 bulan. Ini bentuk komitmen Pemkot Magelang. Selain coverage jadi penuh 12 bulan, juga nanti kita sisir yang belum masuk, sembari memberikan pemahaman bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak akan menghilangkan ban-sos," ungkapnya.

Kepala Cabang BP Jamsostek Magelang Bimo Galuh Saputra Ahmad mengaku senang karena dua pemerintah daerah di wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang, mendapatkan penghargaan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Kota Magelang membuat inovasi untuk mengikutsertakan pekerja rentan ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah. Bimo optimistis langkah baik ini akan diikuti pemda yang lainnya.

Sementara itu, Kepala BP Jamsostek Kanwil Jawa Tengah dan DIY, Isnavodiar Jatmiko mengatakan ada 7 pemerintah daerah di Jawa Tengah penerima penghargaan telah menunjukkan komitmen, inovasi, dan keberanian mereka dalam memberikan keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Kota Magelang menjadi salah satu da-

erah dengan tingkat kepatuhan badan usaha yang baik atau sekitar 58 persen pekerja telah terdaftar dalam program Jamsostek.

Disebutkan, dukungan pemda membantu mempercepat terwujudnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Di sisi lain, pihaknya masih membutuhkan dukungan pemda untuk menggaet pekerja ekosistem desa.

"Lapisan masyarakat di desa sangat luas. Tidak semua harus dibantu melalui mekanisme anggaran, tetapi ada masyarakat yang juga punya kemampuan membayar secara mandiri. Konteksnya, mereka bisa diedukasi," jelas Isnavodiar. **(Tha)-d**

PIMPINAN DPRD PURBALINGGA DILANTIK

Segera Dilakukan Pembentukan AKD

PURBALINGGA (KR) - Pimpinan DPRD Purbalingga periode 2024-2029 resmi terbentuk. Dipandu Ketua Pengadilan Negeri (PN) Purbalingga Eko Julianto, empat pimpinan masing-masing Bambang Irawan dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai ketua, Aman Waliyuddin dari Fraksi PKB, Aris Widiarso dari Fraksi PKS dan Hj Tenny Juliawati dari Fraksi Partai Golkar sebagai wakil ketua, mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna, Jumat (11/10).

Acara dihadiri seluruh anggota DPRD Purbalingga Plt Bupati Purbalingga Sudono beserta jajaran Forkompimda dan tamu undangan lain. Ketua DPRD Purbalingga definitif, Bambang Irawan menegaskan pihaknya siap melaksanakan tugas. Sejumlah agenda akan dilaksanakan untuk mendukung kinerja lembaga. Termasuk di antaranya pembentukan Alat



KR-Toto Rusmanto

Para pimpinan DPRD Purbalingga 2024-2029 foto bersama istri se usai pelantikan dan pengucapan sumpah janji.

Kelengkapan Dewan (AKD).

Plt Bupati Purbalingga, Sudono mengucapkan selamat kepada pimpinan definitif DPRD Purbalingga periode 2024-2029. Dia berharap lembaga legislatif bisa bersinergi untuk melaksanakan tugas, guna mendukung proses pembangunan daerah.

Setelah pengucapan sumpah dan janji, dilakukan penyerahan palu sidang dari Pimpinan Sementara DPRD Purbalingga Aman Waliyudin kepada Ketua DPRD Purbalingga Bambang Irawan. "Penetapan pimpinan definitif DPRD Purbalingga periode 2024-2029 sesuai dengan SK

(Surat Keputusan) Pj Gubernur Jateng 170/192 tertanggal 3 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Purbalingga Masa Jabatan 2024-2029," tutur Sekretaris DPRD Purbalingga Edhy Suryono.

Sebelumnya, Pimpinan Sementara DPRD Purbalingga dengan surat

nomor 172/279/2024 tanggal 27 September 2024 telah mengusulkan calon Pimpinan DPRD Purbalingga kepada Pj Gubernur Jateng. Mengacu Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pimpinan DPRD terdiri atas satu ketua dan tiga wakil ketua untuk DPRD yang beranggotakan sampai dengan 50 orang. Selain itu, pada ayat dua dinyatakan bahwa Pimpinan DPRD tersebut berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD," jelasnya.

Sesuai Pasal 164 Ayat (2) tersebut, lanjut Edhy Suryono, partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD. Melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan Anggota DPRD yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD. **(Rus)-d**

BANYAK PROBLEM PILKADA DI KARANGANYAR

Bawaslu Ajak Pengawasan Partisipatif

KARANGANYAR (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar mengajak masyarakat ikut mengawal jalannya Pilkada serentak 2024. Masyarakat dinilai punya

peran penting menentukan keberhasilan demokrasi. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023, Abdullah Dahlan di hadapan peserta Evaluasi Pe-

laksanaan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Karanganyar, Kamis (10/10).

Dalam forum tersebut diundang berbagai unsur untuk berdiskusi mulai pegiat media sosial hing-

ga insan pers. Abdullah mengatakan problem demokrasi menghadang pelaksanaan pemilu bersih di antaranya politik uang, politisasi birokrasi, kampanye hitam, penyebaran berita hoaks dan sebagainya. Masyarakat sebagai komponen utama pemilu perlu cerdas menyikapinya. Jangan malah terbawa arus dan memperkeruh suasana.

"Pilkada momen strategis kepemimpinan daerah. Partisipasi masyarakat penting. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemilu berintegritas dan bersih dapat berupa mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran ke Bawaslu," jelas Abdullah.

Masyarakat dinilai paling tahu kondisi lapangan karena bersinggungan langsung dengan stakeholder politik di lapangan. Di level pemilih, me-

reka bisa terkena langsung kampanye hitam. Pilihannya pada menolak atau malah terpancing. "Di sini, partisipasi masyarakat diandalkan menolak kampanye hitam, memediasi antarsesama agar ikut menyukkseskan pemilu. Partisipasi masyarakat mendorong calon pemimpin komitmen mewujudkan janji kampanye," ungkap Abdullah.

Ketua Bawaslu Karanganyar Nuning Ritwanita Priliastuti mengatakan masyarakat merupakan gabungan banyak unsur. Semua unsur itu digandeng dalam menyukseskan pengawasan partisipatif. "Ayo bantu kami mencegah pelanggaran Pilkada 2024. Dengan seringnya berdiskusi dan berkumpul, harapannya berdemokrasi lebih baik," ajaknya. **(Lim)-d**



KR-Abdul Alim

Ketua Bawaslu Karanganyar Nuning R Priliastuti membuka evaluasi pengawasan partisipatif.